



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 9/9 — 2003 No. 72.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-1127.HT.01.01.TH.94.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 28 Pebruari 1992 nomor : 0270/02/Not/1992 dari Notaris R.N. Sinulingga, SH., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;
- Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas : P T. Bintang modern Sumberlestari NPWP. 1.572.289.6-014. berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 1991 nomor 115 dihadapan Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH., yang berkedudukan di, Jakarta dan diperbaiki dengan akta tanggal 18 Pebruari 1993 nomor 410 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga;
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 1994.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.

DIREKTUR PERDATA

RATNAWATI WIDJAYA, SH.

NIP. 040013295.

Pada Hari Rabu Tanggal 23-07-2003 Akta Ini Telah Didaftarkan Dalam Register Untuk Itu Yang Berada Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah No. 21/A.PT/HKM/2003.PN.JAK.SEL.

Panitera Pengadilan Negeri
Jakart Selatan

Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH
NIP. 040028345

Upah Tulis : Rp. 500,-

8144

PERSEROAN TERBATAS

PERSEROAN TERBATAS**"PT. BINTANGMODEREN SUMBERLESTARI"****Nomor : 115.**

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (11-11-1991).

Hadir dihadapan saya, Richardus Nangkih Sinulingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akte ini :

1. Tuan Indra Suyono, Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pejaten Barat nomor 11 A, RT 001/RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.
2. Nona Lie Ayu Deassy Ratih, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pejaten Barat nomor 11, RT 001/RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .**Pasal 1.**

Perseroan terbatas ini bernama "P T. B i n t a n g m o d e r e n S u m b e r l e s t a r i" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai Cabang atau perwakilan ditempat lain baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

J a n g k a w a k t u .**Pasal 2.**

Perseroan ini dimulai pada tanggal Anggaran Dasar ini disetujui oleh yang berwenang, dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

Maksud dan tujuan.

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah :

- a. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor-ekspor, lokal serta antar pulau/daerah baik untuk perhitungannya sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain dan usaha-usaha sebagai grosir, leveransir/supplier, distributor, penyalur dan pengecer dari segala macam barang dagangan.
- b. Menjalankan usaha keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Menjalankan usaha dibidang segala macam jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.
- d. Menjalankan usaha dibidang perindustrian, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan/pertambakan.
- e. Mendirikan dan menjalankan usaha pemborong/kontraktor, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk pula gedung-gedung, jalanan, jembatan, lapangan, pengairan, penggalian dan pengurugan tanah, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum dan telekomunikasi serta pekerjaan-pekerjaan bangunan termasuk pula tanah dan bangunan (Real Estate).

satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu perseroan berhak bekerjasama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini.

Modal.

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, selambatnya pada tanggal Anggaran Dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh :

- a. Penghadap Tuan Indra Suyono, Sarjana Ekonomi, tersebut; sebanyak 33 (tigapuluh tiga) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar tiga puluh tiga juta rupiah Rp. 33.000.000,-
- b. Penghadap Nona Lie Ayu Deassy Ratih tersebut; sebanyak 17 (tujuh belas) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar tujuh belas juta rupiah Rp. 17.000.000,-
 atau seluruhnya 50 (lima puluh) saham atau bernilai nominal sebesar lima puluh juta rupiah Rp. 50.000.000,-

3. Saham-saham lainnya yang belum di ambil bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi, dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.

Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender tersebut, ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut,

maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.

S a h a m.

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka suara yang di keluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

S u r a t s a h a m.

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan seorang Komisaris.
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan seorang Komisaris.
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pengganti surat saham.

Pasal 7.

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya permintaan dari - dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan - dari kejadian ini oleh Direksi dibuat Berita Acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis - mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.

Daftar saham.

Pasal 8.

1. Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disimpan ditempat kedudukan perseroan.

Dalam daftar saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar saham.

3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.

4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam daftar saham, apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan seorang Komisaris.

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.

6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar saham sebaik-baiknya.

8. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar saham pada waktu jam kerja kantor perseroan.

Pemindahan hak atas saham.

Pasal 9.

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang di tunjuk oleh rapat umum pemegang saham dan dengan perantaraan Direksi.

2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan

menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembelinya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham, satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya.

5. Pemindehan saham secara lain dari pada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

K e p e n g u r u s a n .

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapanpuluh dua).

Tugas dan wewenang Direksi.

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.

3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan;

akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di Bank-bank);
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan;

- c. mengikat perseroan sebagai penjamin;
- d. mendirikan suatu usaha baru;

haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

6. Didalam hal perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam perseroan.

7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.

8. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Rapat Direksi.

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.

3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung dengan mendapat

tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana

dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Dewan Komisaris.

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua).

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pasal 14.

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan

berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakan rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.

3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dilakukan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

T a h u n b u k u .

Pasal 16.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup.

untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal tiga-puluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (31-12-1992).

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya harus sudah disediakan di kantor Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;

- b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Rapat umum tahunan pemegang saham.

Pasal 18.

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (1993).

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :

- a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah di capai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan perseroan;
- b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat;
- c. Diputuskan pembagian keuntungan;
- d. Dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

Rapat umum luar biasa pemegang saham.

Pasal 19.

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas Permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau

seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini, dalam Rapat itu ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Tempat dan panggilan rapat.

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.

2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat. Panggilan untuk Rapat Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Pimpinan dan berita acara
rapat umum pemegang saham.

Pasal 21.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.

3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Korum, hak suara dan keputusan.

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jikalau Rapat itu dihadiri oleh sedikitnya 51 % (limapuluh satu prosen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari sedikitnya 51% (limapuluh satu prosen) kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Keuntungan.

Pasal 23.

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.

4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

D a n a c a d a n g a n .

Pasal 24.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

P e n g u b a h a n a n g g a r a n d a s a r .

Pasal 25.

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangngnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangngnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

Pembubaran dan likwidasi.

Pasal 26.

1. Ketentuan pasal 25 mutatis-mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas.

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan disertai panggilan untuk para kreditur.

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

Peraturan penutup.

Pasal 27.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

Direktur : Penghadap Tuan Indra Suyono, Sarjana Ekonomi tersebut;

Komisaris : Penghadap Nona Lie Ayu Deassy Ratih tersebut.

Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah :

A k t a - i n i.

Dibuat sebagai minuta dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri oleh Nona Tuswita

dan Tuan Binsar Simanjuntak, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu renvoi, yakni satu tambahan, tanpa coretan maupun coretan dengan penggantian.

(Minuta akte ini ditanda tangani dengan semestinya).

Diberikan Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya.

Notaris Jakarta

R.N. SINULINGGA, SH.

Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 26 Januari 1994 No. : C2-1127.HT.01.01.TH.94.

Diketahui :

Direktur Jenderal

Hukum dan Per-Undang2-an

u.b

Direktur Perdata

RATNAWATI WIDJAYA, SH.

NIP. 040013295.

Pada Hari Rabu Tanggal 23-07-2003 Akta Ini Telah Didaftarkan Dalam Register Untuk Itu Yang Berada Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah No. 21/A.PT/HKM/2003.PN.JAK.SEI.

Panitera Pengadilan Negeri
Jakart Selatan

Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH
NIP. 040028345

Upah Tulis : Rp. 15.000,-

8144

PERSEROAN TERBATAS

PERUBAHAN**Nomor : 410.**

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (18-2-1993).

Hadir dihadapan saya, Richardus Nangkih Sinulingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini :

Tuan Fransiscus Piran, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta; menurut keterangannya didalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam akte pendirian perseroan yang akan tersebut.

Penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerangkan :

bahwa berdasarkan akte saya, Notaris tertanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (11-11-1991) nomor 115 telah didirikan suatu perseroan terbatas P T. Bintangmoderen Sumberlestari berkedudukan di Jakarta, serta dengan memakai anggaran dasar seperti tersebut dalam akte termaksud diatas;

bahwa berdasarkan pasal 27 dari akte pendirian tersebut diatas penghadap telah diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dan menetapkan serta menyusun segala perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan pengesahan tersebut;

bahwa untuk menghindarkan keberatan-keberatan dari yang berwajib mengenai pengesahan anggaran dasar perseroan tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal duapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilan puluh dua (21-12-1992) nomor C2-HT.01.01.A.10278 dengan ini mengadakan perubahan-perubahan dalam akte pendirian perseroan tersebut sebagai berikut :

Pasal 22 ayat 8 anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, dirobah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya pasal 22 ayat 8 ditulis dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 22.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari sedikitnya 51% (limapuluh satu prosen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

Akhirnya penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerangkan bahwa kuasa yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dari akte pendirian perseroan tersebut diatas juga berlaku untuk perubahan ini.

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah :

A k t e - i n i .

Dibuat sebagai minuta dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri oleh Nyonya Tioman Simanjuntak dan Nona Tuswita, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua renvoi, yakni satu coretan dengan penggantian dan satu tambahan, tanpa coretan.

(Minuta akte ini ditanda-tangani dengan semestinya).

Diberikan Seagai Salinan Yang Sama Bunyinya.

Notaris Jakarta

R.N. SINULINGGA, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 26 Januari 1994 No. : C2-1127.HT.01.01.TH.94.

Diketahui :
Direktur Jenderal
Hukum dan Per-Undang2-an
u.b
Direktur Perdata

RATNAWATI WIDJAYA, SH.
NIP. 040013295.

Pada Hari Rabu Tanggal 23-07-2003 Akta Ini Telah Didaftarkan Dalam Register Untuk Itu Yang Berada Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah No. 135/A.DLL/HKM/2003.PN.JAK.SEI.

Panitera Pengadilan Negeri
Jakart Selatan

Upah Tulis : Rp. 1.500,-

Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH
NIP. 040028345

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.